

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA **(Studi Pada Desa Selante Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa)**

Wardatul Hafifah¹, Sunariyanto², Suyeno³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia*

E-mail: wardathafi@gmail.com

ABSTRAK

Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2024 tidak mencukupi dalam pembangunan infrastruktur jalan raya di Desa Selante. Hal ini dipengaruhi karena adanya program pembangunan lain serta program pemberdayaan masyarakat, sehingga memerlukan beberapa strategi pemerintah desa dalam usaha mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan naratif melalui pengamatan, pengumpulan data dan analisis terhadap fenomena yang terjadi. Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang terjadi yang dianalisis terkait Strategi Pemerintah Desa Selante dalam Meningkatkan Infrastruktur Dana Desa. Dalam penelitian ini menggunakan teori Kaplan dan Norton (2021) sebagai pisau analisis pembahasan yang didalamnya memuat empat poin penting yang memuat empat indikator utama, (1) perspektif keuangan, (2) perspektif pelanggan atau penggunaan, (3) perspektif proses internal, (4) perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah desa selante telah dilakukan secara efektif terutama dalam proses pembangunan desa, namun dalam proses efisiensi anggaran belum terlaksana secara maksimal yang dikarenakan adanya suntikan dana desa dari pihak ke-tiga Ketua-DPRD Sumbawa. Secara proses perencanaan pembangunan infrastruktur telah terlaksana secara terstruktur yang terlaksana secara teknis, administratif dan partisipatif yang dimulai dari musyawarah mufakat bersama masyarakat atau bottom to up.

Kata Kunci: Permasalahan, Strategi, Peningkatan Infrastruktur

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Desa dalam memperkuat kedudukan desa secara nasional, dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Guna mencapai tujuan tersebut Pasal 7 Ayat (1) memberikan hak dan prioritas penggunaan dana desa dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumberdaya desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta disusun secara partisipatif atau bersama masyarakat dan bersifat akuntabel.

Dalam peningkatan infrastruktur desa harus berorientasi pada prinsip sustainability atau bermanfaat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur desa saling terkait dengan beberapa prinsip seperti, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Dalam hal ini pentingnya partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam tercapainya tujuan pembangunan desa yang berorientasi pada masyarakat. Salah satu usaha peningkatan infrastruktur desa yang perlu diperhatikan terkait dengan infrastruktur jalan desa yang dikarenakan ketika desa memiliki sarana infrastruktur yang mendukung maka diharapkan dapat mendukung kemudahan akses masyarakat yang berdampak pada peningkatan perekonomian, pendidikan serta kemudahan akses kesehatan

masyarakat. Amarta Setya (1999) berpendapat bahwa infrastruktur jalan harus dibangun berdasarkan prinsip keadilan sosial. Oleh karena itu pemerintah desa perlu memiliki strategi yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan peningkatan infrastruktur berdasarkan prinsip keadilan sosial. Salah satu Desa di Indonesia yang berusaha melakukan peningkatan infrastruktur jalan desa, ialah Desa Selante, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Hal ini dilaksanakan berlandaskan pada Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Sumbawa. Pada Pasal 1 Ayat (8) dijelaskan bahwa pemerintah desa yang berwenang memiliki tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desa serta menjalankan tugas pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dalam Pasal 5 Huruf (K) juga disebutkan salah satu kewajiban pemerintah desa adalah peningkatan infrastruktur bersekala desa termasuk pembuatan jalan desa yang menghubungkan wilayah permukiman ke wilayah pertanian.

Desa Selante, merupakan salah satu kawasan desa dengan letak yang strategis yang wilayahnya terbagi diantara beberapa sektor, seperti sektor peternakan, perikanan, pertanian, dan sektor pariwisata. Sehingga, ditinjau dari kawasan

geografis tersebut, memerlukan peningkatan infrastruktur sarana penghubung atau jalan desa yang layak dan mendukung aktivitas kegiatan masyarakat. Namun, pada tahun 2024 Pemerintah Desa Selante mengalami kesulitan dalam proses peningkatan infrastruktur yang disebabkan Anggaran Dana Desa (ADD) tidak dapat mendukung proses peningkatan infrasktruktur jalan desa.

Disisi lain peningkatan infrastruktur ini tidak menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah. Yang dikarenakan munculnya program pembangunan nasional dan daerah serta adanya program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah daerah yang menjadi prioritas nasional. Kondisi ini menyebabkan terjadinya penghambatan peningkatan infrastruktur, faktor. Oleh karena itu penguatan dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan terutama partisipasi masyarakat. Dalam hal ini partisipasi masyarakat Desa Selante masih tergolong rendah yang dirutama dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan juga menjadi tantangan pemerintah Desa Selante Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Oleh, karena itu guna mengetahui proses penyelesaian masalah terkait fenomena tersebut, serta berdasarkan penjelasan diatas terkait usaha pemerintah Desa Selante dalam meningkatkan infrastruktur jalan desa. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Infrastruktur Desa (Studi Pada Desa Selante, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat)”**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi pemerintah Desa Selante dalam meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan?
2. Apa faktor pendukung yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Selante?
3. Apa faktor penghambat yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Selante?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis strategi pemerintah Desa Selante dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan desa.
2. Mengetahui, menganalisis faktor pendukung dan penghambat peningkatan infrastruktur dalam pembang jalan Desa Selante

Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini berfungsi sebagai sarana referensi

tentang stretagi pemerintah Desa Selante dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan desa guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang Ilmu Administrasi Publik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan pengalaman bagi peneliti dan pembaca tentang hambatan, tantangan dan strategi peningkatan infrastruktur jalan Desa Selante, Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat.

Tinjauan Pustaka **Penelitian Terdahulu**

1. Muhammad Fatwa (2023) Strategi peningkatan infrastruktur desa berbasis keadilan sosial dimulai dari masyarakat melalui proses musyawarah mufakat dari tingkat dusun hingga ke tingkat desa. Hal ini diarahkan sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang meliputi aspek sosial, ekonomi, ataupun keagamaan.
2. Fachruzi Juan Syahputra (2021) dalam proses peningkatan infrastruktur desa harus dilaksanakan dari hulu ke-hilir yang artinya pembangunan harus dilaksanakan guna menyelesaikan permasalahan di masyarakat.
3. Putra Muhammad Azis (2002) dalam penelitian ini memberikan gambaran bahwa dalam usaha mewujudkan proses pembangunan desa yang efektif peran pemimpin atau kepala desa memegang peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan.
4. Foarota Laia, Mativus Bangun, Sungguh Hati Halawa (2023) dalam usaha mencapai tujuan peningkatan infrastruktur desa secara tepat sasaran memerlukan perencanaan prioritas pembangunan baik secara jangka pendek, jangka panjang, dan perhitungan secara teliti.
5. Ayu Suwana dan Yustinus Farid Setyobudi (2020) dalam peningkatan infrastruktur memerlukan peran aktif masyarakat dalam bentuk partisipasi aktif serta kerjasama masyarakat.

Metode Penelitian **Jenis Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berorientasi pada pengamatan, proses pengumpulan data serta analisis mendalam yang dilakukan peneliti saat penelitian berlangsung. Menurut Sugiyono (2015) adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami beberapa fenomena sosial yang terjadi dilapangan, secara mendalam dan kompherhensif. Oleh karena itu data penelitian yang didapatkan peneliti, nantinya akan dianalisis, dikaji serta di validasi guna mendukung pernyataan yang tersaji dalam hasil penelitian secara kompherhensif dan mendalam.

Fokus Penelitian

Sugiyono (2023:54) menjelaskan bahwa fokus penelitian kualitatif tidak menempatkan penelitiannya hanya berdasarkan data variable penelitian, namun berdasarkan seluruh kejadian yang didapatkan peneliti saat penelitian berlangsung. Oleh sebab itu, diperlukan adanya fokus penelitian yang mempermudah peneliti guna menjadi acuan terlaksananya proses penelitian, sehingga hasil yang didapatkan dapat dipahami dengan mudah, mendalam dan kompherhensif. Dalam penelitian ini berfokus pada strategi Pemerintah Desa Selante dalam usaha mengatasi peningkatan infrastruktur jalan desa yang berorientasi pada asas keadilan sosial bagi masyarakat. Secara spesifik penelitian ini berfokus pada tiga indicator utama,

- 1) Strategi Pemerintah Desa Selante dalam pengoptimalan pembangunan infrastruktur yang didalamnya terdapat tiga prespektif, prespektif keuangan, prespektif pengguna, prespektif proses internal.
- 2) Faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, yang memuat dua indicator, perencanaan yang baik serta peran dan dukungan pemerintah daerah.
- 3) Faktor penghambat pembangunan infrastruktur jalan Desa Selante, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dengan ketiga indicator tersebut maka, data yang didapatkan peneliti akan diolah , diamati serta dianalisis kemudian ditarik pembahasaan dan kesimpulan atas fenomena peningkatan infrastruktur jalan Desa Selante, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.

Situs dan Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di objek terjadinya fenomena penelitian, yaitu di kawasan Desa Selante, Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, guna mengetahui strategi pemerintah desa dalam mendukung peningkatan infrastruktur pembangunan jalan Desa Selante, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Sumber Data

Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif sumber data utama dalam penelitian ini didapatkan peneliti, dari berjalanya proses penelitian, mulai dari hasil pengamatan, observasi, dan berlangsungnya proses penelitian.

- a) Data Primer Data primer merupakan data pokok yang digunakan peneliti sebagai alat analisis penelitian, data ini didapatkan dari proses pengamatan, observasi, wawancara pihak utama yang mendukung hasil penelitian. Data utama

penelitian berasal dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan aparat pemerintah Desa Selante, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

- b) Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung atau data tidak langsung yang digunakan peneliti untuk mendukung proses penelitian (Sugiyono, 2017:104). Dalam penelitian ini, sumberdata sekunder didapatkan peneliti dari hasil penelitian orang lain, peraturan perundang-undangan yang mendukung proses analisis peneliti.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017) teknik pengumpulan data merupakan metode atau cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menjawab hasil penelitian. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan berdasarkan tiga strategi utama, meliputi proses :

- a. Observasi

Menurut Arikunto (2010) Observasi merupakan proses pengamatan langsung yang dilakukan peneliti di objek penelitian yang dilakukan dalam situasi tertentu yang dilakukan secara sistematis dilokasi penelitian. Pada penelitian ini observasi dilakukan di Kantor Desa Selante, mengenai proses pengamatan aktivitas pegawai kantor Desa Selante dan Pengamatan keadaan dilapangan atas proses peningkatan infrasktruktur jalan desa.

- b. Wawancara

Menurut Sutrisno Hadi (1986) wawancara merupakan proses komunikasi antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari informan yang dilakukan oleh komunikator. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan peneliti dengan responden mengenai informasi mendalam dengan aparat Pemerintah Desa Selante, yang meliputi ; Kepala Desa Selante, Sekretaris Desa, BPD, dan Masyarakat

- c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang didapatkan peneliti saat proses penelitian berlangsung, baik berupa dokumen, surat menyurat, peraturan perundangan, ataupun bukti gambar yang mendukung hasil penelitian (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini dokumentasi utama didapatkan peneliti dari gambar yang didapatkan saat proses penelitian berlangsung, serta arsip desa yang mendukung hasil penelitian.

Teknik Analisis Data

Menurut Miles and Hubberman alam proses pelaksanaan penelitian kualitatif kebenaran penelitian dibuktikan ketika peneliti melakukan proses penelitian dilapangan, oleh karena itu ketika proses penelitian berlangsung proses analisis data harus dilakukan saat proses penelitian berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode

tertentu (Sugiyono, 2020). Dalam prosesnya, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus yang memuat empat proses, pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data.

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses dimana peneliti mulai melakukan proses penelitian yang dilakukan mulai dari teknik pencarian data, dari mulai berlangsungnya penelitian sampai periode tertentu, terkait dengan Strategi Pemerintah Desa Selante dalam peningkatan infrastruktur jalan desa.

2) Reduksi Data

Reduksi data dilakukan peneliti dengan melakukan pemilahaan, penyederhanaan yang dikumpulkan dan di proses dan diolah guna memperoleh gambaran yang jelas yang mempermudah peneliti untuk melengkapi data lanjutan.

3) Penyajian Data

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan peneliti dengan menyusun, mengorganisasikan, serta menyajikan data secara terseruktur, sehingga pola-pola penjelasan dapat memunculkan hubungan yang dapat ditarik dalam satu kesimpulan yang valid serta relevan berdasarkan hasil penelitian.

4) Verifikasi dan Kesimpulan

Proses verifikasi dan kesimpulan merupakan proses berkesinambungan yang dilakukan peneliti, dengan menemukan pola, kategori, atau tema yang relevan yang memudahkan pembaca dan peneliti mempermudah memahami hasil penelitian yang dilakukan.

Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif teknik keabsahan data digunakan untuk meningkatkan kebenaran data yang disajikan dalam penelitian. Oleh karena itu, data yang disajikan peneliti harus berdasarkan data objek yang didapatkan peneliti saat penelitian berlangsung, selain itu guna memastikan kebenaran data kualitatif uji keabsahan data. Menurut Wijaya (2018: 120-121) uji keabsahan data dapat dilakukan dengan pengecekan dari sumber data yang didapatkan berdasarkan cara dan waktu, sehingga dikenal dengan sistem triangulasi. Berikut, merupakan teknik keabsahan data yang dilakukan peneliti.

1. Triangulasi Sumber dilakukan peneliti dengan melakukan validasi atau pengecekan terhadap data, yang berorientasi pada sumber didapatkannya data yang diperoleh, seperti dari hasil wawancara, observasi, arsip ataupun dokumen pendukung.
2. Triangulasi Teknik, merupakan teknik pengujian keabsahan data yang diperoleh peneliti dari sumber didapatkannya data, seperti data yang didapatkan dari hasil observasi dan kemudian divalidasi dalam proses wawancara.
3. Triangulasi Waktu, merupakan teknik uji

keabsahan data kualitatif yang disesuaikan berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan pada waktu tertentu. Teknik ini dilakukan untuk menentukan ke-validan data berdasarkan terlaksananya proses wawancara yang dilakukan.

Pembahasan

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa, secara tidak langsung memberikan hak dan wewenang bagi pemerintah desa untuk menjalankan proses pemerintahan baik secara administratif maupun proses pemberdayaan masyarakat. Selain itu pemerintah desa juga diberikan kewenangan atau hak otonomi berupa proses pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial serta proses pemberdayaan guna mencapai tujuan desa yang kuat, mandiri, demokratis, serta berkeadilan. Oleh sebab itu, partisipasi dan dukungan dari berbagai sektor sangat diperlukan baik dari pemerintah pusat, daerah ataupun masyarakat.

Menurut Ayu Suwana dan Yustinus Farid Setyobudi (2020) dalam usaha meningkatkan pembangunan desa terutama dalam sektor peningkatan infrastruktur memerlukan peran partisipasi serta kerjasama masyarakat guna mencapai keberhasilan pembangunan. Sedangkan menurut Putra Muhammad Azis (2002) memberikan pandangan bahwa dalam menjalankan pembangunan desa memerlukan inisiatif dan peran pemimpin atau kepala desa secara akuntabel, transparan dalam usaha mencapai tujuan yang efektif. Menurut Foarota Laia, Mativus Bangun, Sungguh Hati Halawa (2023) proses pelaksanaan pemerintahan dan rencana pembangunan desa memerlukan perencanaan prioritas pembangunan baik secara jangka pendek, jangka panjang, dan perhitungan secara teliti. Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa dalam usaha mencapai tujuan desa sesuai peraturan perundang-undangan diperlukan peran pemerintah sebagai inisiator, serta masyarakat sebagai tujuan dari pembangunan dengan berpartisipasi atau ikut serta merumuskan tujuan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, disisilain perencanaan, penentuan prioritas pembangunan harus disusun dengan strategi yang matang serta perhitungan yang teliti, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai secara efisien dan efektif.

Dalam hal ini, pemerintah Desa Selante, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, yang merupakan salah satu desa dengan keunggulan disektor pertanian, perdagangan, peternakan serta pariwisata sangat membutuhkan pembangunan desa disektor infrastruktur jalan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah desa memerlukan strategi pembangunan yang tepat sasaran, efisien dan efektif.

a. Strategi Pemerintah Desa dalam Mengoptimalkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Selante

Secara garis besar strategi pengoptimalan pembangunan desa merupakan suatu bentuk rencana atau serangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah desa guna mencapai tujuan pembangunan secara efisien dan efektif demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Desa Selante berusaha mewujudkan program pembangunan infrastruktur jalan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penyusunan strategi pembangunan juga harus didasarkan pada Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) merupakan forum antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Masyarakat desa untuk menyusun rencana pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti ditemukan bahwa proses pelaksanaan strategi Pembangunan Desa Selante, sejalan dengan teori Kaplan dan Norton (2021) yang mengembangkan prinsip *Balanced Scorecard* dengan empat indikator yaitu, (1) Prespektif Keuangan, (2) Prespektif Pelanggan/Pengguna, (3) Prespektif Proses Internal, (4) Prespektif Pembelajaran dan Pertumbuhan.

1) Prespektif Keuangan

Prespektif keuangan merupakan suatu bentuk perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan guna mencapai tujuan perusahaan atau lembaga secara efisien (Jamis, C. Van Home, 2002). Sedangkan dalam prespektif Kaplan dan Norton (2021) pengaturan dan penyusunan strategi keuangan perusahaan perlu disusun dengan baik dan efisien yang berfokus pada peningkatan nilai, profitabilitas, dan efisiensi biaya, sehingga dapat mencerminkan kinerja perusahaan secara positif di masyarakat.

Proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan Desa Selante pada tahun 2024 awalnya mendapatkan hambatan, yang dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran desa, tidak ditetapkannya sebagai program prioritas pembangunan. Dalam hal ini, pemerintah Desa Selante berusaha mencari alternatif dari keterbatasan anggaran tersebut dengan bekerjasama dengan Ketua DPRD Desa untuk mendukung dan membantu memenuhi proses pendanaan pembangunan jalan Desa Selante, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Selain itu ditinjau dari indikator prespektif keuangan harus memuat tiga prinsip utama yaitu prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

a. Akuntabilitas

Dalam hal ini prinsip akuntabilitas dalam prespektif keuangan berorientasi pada bentuk

tanggungjawab pejabat publik untuk bertindak sesuai dengan kewenangan serta bertanggungjawab atas kinerja yang dilakukan (Romzeck dan Dubnick, 1987). Sedangkan menurut Kaplan dan Norton, prinsip akuntabilitas dalam prespektif keuangan berorientasi pada bagaimana perusahaan atau lembaga dapat mengelola keuangan demi mencapai tujuan, peningkatan kepercayaan publik dengan mengelola secara efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan Desa Selante merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan masyarakat karena dengan infrastruktur jalan yang baik dapat membantu peningkatan ekonomi, pertanian dan pariwisata desa. Oleh sebab itu, Pemerintah Desa Selante sebagai pihak yang berwenang berusaha mewujudkan tujuan tersebut dengan memulai perencanaan pembangunan jalan desa, dan dilaksanakan pada tahun 2024, dengan keterbatasan anggaran pemerintah desa juga berusaha menemukan solusi efektif dengan bekerjasama dengan Kepala DPRD Sumbawa untuk membantu memenuhi kekurangan anggaran yang diperlukan, hal ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa Selante dalam peningkatan kekuatan dan kemakmuran Desa Selante.

b. Efisiensi

Menurut Petter dan Drucker (1967) menegaskan bahwa efisiensi merupakan bentuk kemampuan atau usaha perusahaan untuk menggunakan sumberdaya secara maksimal. Sedangkan Kaplan dan Norton, menegaskan bahwa efisiensi keuangan dalam prespektif keuangan berfokus pada usaha perusahaan meningkatkan kinerja keuangan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Dengan tidak ditetapkannya pembangunan infrastruktur jalan sebagai prioritas desa dan terbatasnya anggaran Desa Selante Pemerintah Desa berhasil mendapatkan dukungan pembiayaan dari Kepala DPRD Kabupaten Sumbawa, namun hal ini belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan teori Kaplan dan Norton yang dikarenakan usaha pemenuhan kekurangan anggaran seharusnya dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Musrembang hingga ketingkat daerah.

c. Efektivitas

Efektivitas dalam prespektif keuangan menurut Kaplan dan Norton berorientasi pada bagaimana kinerja organisasi atau perusahaan mencapai tujuan secara cepat dengan meningkatkan kualitas kinerjanya. Dalam hal ini pembangunan infrastruktur di Desa Selante yang sempat terhambat oleh adanya keterbatasan anggaran dapat diatasi pemerintah desa dengan adanya dukungan dana dari kepala DPRD Sumbawa, sehingga

pembangunan dapat dilaksanakan pada tahun 2024 serta manfaat dari program ini dapat dirasakan masyarakat. Dengan ini prinsip efektivitas dalam perspektif keuangan Kaplan dan Norton dapat dikatakan berjalan sesuai teori yang dicantumkan.

2) Perspektif Pelanggan /Pengguna

Menurut Kaplan dan Norton, Perspektif Pelanggan atau Pengguna disini berkaitan dengan usaha organisasi atau lembaga memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya. Adanya program peningkatan infrastruktur jalan oleh Pemerintah Desa Selante ditujukan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kualitas hidup dan mendorong pertumbuhan perekonomian desa. Selain itu terdapat 3 prinsip utama dalam menunjang tercapainya perspektif pelanggan / pengguna sebagai berikut, (1)Kepuasan Masyarakat, (2) Aksesibilitas Pelayanan, (3) Keadilan Pelayanan.

a. Kepuasan Masyarakat

Menurut Zeithmal (1990) kepuasan masyarakat merupakan bentuk rasa kepuasan atau kesesuaian antara harapan dan persepsi masyarakat terhadap layanan atau kualitas produk yang diterima. Sedangkan menurut Kaplan dan Norton kepuasan masyarakat pada pemerintah desa merupakan bentuk tercapainya harapan atau yang dibutuhkan masyarakat telah dapat dipenuhi oleh pemerintah desa, baik berkenaan dengan pelayanan, pembangunan atau penyediaan fasilitas umum. Adanya program pembangunan jalan Desa Selante membuktikan usaha pemerintah desa meningkatkan kepuasan masyarakat dalam usaha mendukung kemudahan akses serta lancarnya proses perekonomian. Oleh karena itu, dengan ini prinsip kepuasan masyarakat telah selaras dengan prinsip kepuasan masyarakat Kaplan dan Norton dalam usaha penguatan perekonomian desa.

b. Aksesibilitas Pelayanan

Dalam hal ini aksesibilitas pelayanan dalam perspektif pelanggan merupakan bentuk usaha perusahaan atau pemerintah untuk meningkatkan kemudahan dalam menjalankan berbagai akses pelayanan yang disediakan. Dengan adanya program pembangunan jalan Desa Selante menunjukkan bukti nyata pemerintah desa untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat dalam berbagai sektor baik pelayanan publik yang disediakan pemerintah desa ataupun peningkatan perekonomian yang dapat memperkuat ekonomi desa. Sehingga dapat ditarik kesimpulan aksesibilitas ekonomi sejalan dengan teori Kaplan dan Norton yang dikarenakan program ini bersinggungan dengan masyarakat serta dapat dirasakan masyarakat secara langsung dan universal.

c. Keadilan Pelayanan

Keadilan pelayanan disini dilakukan guna menciptakan kesetaraan pelayanan pada masyarakat tanpa melihat, status sosial, pangkat ataupun jabatan, yang artinya pelayanan yang diberikan pemerintah berlaku untuk umum sehingga dapat meningkatkan kepuasan, dan loyalitas masyarakat kepada pemerintah. Dalam hal ini program pembangunan jalan desa yang dijalankan Pemerintah Desa belum sepenuhnya berjalan merata yang dikarenakan beberapa aspek yaitu, keterbatasan anggaran, tidak termasuknya program pembangunan sebagai program prioritas daerah. Sehingga keadilan pelayanan belum dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

3) Perspektif Internal

Menurut Kaplan dan Norton perspektif internal mengacu pada pelaksanaan operasional organisasi atau perusahaan dapat berjalan secara obyektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam teori *Balanced Scorecard* (BSC) Mardiasmo (2002) menjelaskan bahwa untuk mencapai perspektif internal setidaknya mencakup dua aspek utama yaitu aspek efisiensi proses dan kualitas proses.

a. Efisiensi Proses

Mardiasmo (2002) menegaskan bahwa efisiensi proses merupakan bentuk kemampuan untuk menggunakan sumberdaya secara maksimal guna mencapai output yang maksimal. Sedangkan Kaplan dan Norton memberikan penegasan terhadap efisiensi proses sebagai bentuk kemampuan organisasi atau lembaga untuk menyusun, merencanakan, serta melaksanakan proses internal secara optimal, namun tetap menggunakan sumberdaya secara hemat dan menghasilkan output yang berkualitas tinggi. Proses pelaksanaan dan program pembangunan infrastruktur di Desa Selante berjalan sekitar 2-3 bulan, selain itu pembangunannya juga belum merata ke seluruh wilayah desa karena keterbatasannya anggaran. Sehingga dapat ditarik benang merah bahwa efisiensi proses telah berusaha dijalankan pemerintah desa namun belum berjalan dengan maksimal.

b. Kualitas Proses

Dalam perspektif internal aspek kualitas proses menekankan tentang pentingnya peran organisasi mengidentifikasi dan mengelola proses internal guna memberikan nilai terbaik kepada pelanggan. Ditinjau dari segi proses pelaksanaan program pembangunan jalan Desa Selante memuat beberapa proses mulai dari tahapan teknis administratif pengajuan izin dan penyusunan anggaran program. selain itu program partisipasi masyarakat dilakukan

pemerintah Desa Selante dengan mengadakan musyawarah dengan masyarakat, guna mengetahui keinginan dan kebutuhan masyarakat. Sehingga program pembangunan yang dirancang dapat berjalan secara obyektif.

b. Faktor Pendukung Yang Mempengaruhi Proses Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Selante

Berjalanya program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dan efektif ketika dukungan dari berbagai pihak didapatkan. Baik dari pemerintah, lembaga ataupun peraturan perundangan. Dalam hal ini berjalanya program pembangunan infrastruktur jalan Desa Selante didukung dan dipengaruhi oleh tiga faktor utama, perencanaan yang baik, dukungan pemerintah dan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

1) Dukungan Pemerintah dan Perencanaan yang baik

Dalam usaha mencapai tujuan pembangunan desa sesuai dengan peraturan perundangan, dukungan pemerintah sangat diperlukan, baik dari pemerintah pusat ataupun daerah. Beberapa bentuk dukungan tersebut, bisa berupa peraturan perundangan dan dukungan anggaran yang dapat membantu proses berjalanya operasional pembangunan. Soetomo (2009) menekankan bahwa dalam pembangunan infrastruktur jalan merupakan bagian dari bentuk strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam hal ini dukungan yang dimaksud bisa berupa perencanaan partisipatif, penggaran, serta pengawasan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu peran aktif pemerintah sangat diperlukan sebagai inisiator, motivator dan pelaksana pembangunan sesuai kesejahteraan masyarakat.

Pada pelaksanaan program pembangunan infrastruktur jalan Desa Selante, dukungan pemerintah diberikan lewat peran aktif Ketua DPRD Sumbawa pada tahun 2024 berupa bantuan dana aspirasi sebesar Rp. 51.000.000, selain itu pihak DPRD juga turut serta melakukan proses pemantauan atas berjalanya program pembangunan infrastruktur jalan desa dapat berjalan secara efektif. Dengan ini, secara tidaklangsung pemerintah daerah ikut serta dalam mendukung proses pembangunan desa disektor infrastruktur jalan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Selain dukungan teknis dan anggaran, strategi perencanaan yang baik perlu dilakukan guna memastikan rencana pembangunan berjalan secara tepat sasaran. Siagian (2005) menegaskan bahwa perencanaan yang baik merupakan proses penentuan serangkaian tindakan masa depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program pembangunan

jalan Desa Selante harus direncanakan dengan matang guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam proses perencanaan program pembangunannya telah dijalankan secara terstruktur dengan sistem musyawarah dari masyarakat, mulai dari tingkat dusun Musyawarah Dusun (Musdus) dilanjutkan ke tingkat Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan masyarakat, Dewan Perwakilan Desa (DPD) dan aparat pemerintah desa.

2) Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga legislative ditingkat desa yang memiliki hak dan kewenangan untuk menjalankan fungsi controlling atau pengawasan terhadap berjalanya peraturan desa (Nugroho, 2014). Dengan berdirinya DPD sebagai lembaga pengawas desa merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah guna memastikan kebijakan berjalan secara transparan dan akuntabel. Secara fungsional BPD merupakan perwakilan dari masyarakat yang berasal dari tokoh masyarakat yang juga memiliki fungsi lain sebagai pengawas kebijakan pemerintah, BPD juga mengawasi kinerja aparat desa mulai dari kepala desa dan aparat pemerintah desa. Dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur Desa Selante, BPD desa telah menjalankan fungsinya dengan baik dengan melakukan pengawasan dan pelaporan penggunaan anggaran pembangunan jalan, serta memastikan kebijakan yang ditetapkan berjalan tepat sasaran.

c. Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Proses Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Selante

Faktor penghambatan pembangunan merupakan segala bentuk kondisi, keadaan, ataupun situasi yang terjadi di wilayah rencana pembangunan yang mana situasi tersebut berpengaruh dan menghambat atas program yang telah direncanakan. Dalam proses pelaksanaan program pembangunan jalan Desa Selante terdapat dua faktor penghambat atas berjalanya program tersebut yaitu disektor ketersediaan anggaran, dan rendahnya partisipasi masyarakat.

1) Keterbatasan Anggaran

Berkembangnya kebutuhan manusia atau masyarakat disuatu wilayah yang cenderung tidak terbatas membuat kebijakan atau program negara tidak berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan negara untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Dengan adanya hal tersebut memerlukan penyusunan rencana keuangan atau anggaran yang tepat dan akurat yang memiliki batasan, serta dapat

direvisi atau disesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi (Adisaputro dan Marwan, 2001:53).

Proses berjalanya program pembangunan infrastruktur jalan Desa Selante, mengalami hambatan yang disebabkan karena adanya keterbatasan alokasi anggaran. Hal ini dikarenakan Anggaran Penerimaan Belanja Desa (APBDes) harus dialokasikan untuk beberapa program pembangunan dan pemberdayaan lain kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan program pembangunan jalan Desa Selante tidak berjalan secara maksimal.

2) Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Proses pembangunan dapat berjalan dengan efektif ketika mendapatkan dukungan dari masyarakat, yang dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya hambatan struktural dan kultural (Mardiasmo, 2022). Partisipasi masyarakat Desa Selante dalam proses pembangunan masih tergolong rendah, hal ini dikarenakan masyarakat belum memiliki skil yang mumpuni dalam pelaksanaan pembangunan sehingga proses pembangunan. Namun, disisi lain dukungan dan partisipasi masyarakat masih diberikan kepada pemerintah desa, lewat partisipasi rapat Musyawarah Dusun (Musdes), Musyawarah Desa (Musdes), dan masyarakat juga masih melakukan pemantauan pada saat program pembangunan berlangsung. Dengan hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa keterbatasan partisipasi masyarakat masih menjadi penghambat program pembangunan jalan desa tidak bisa selesai secara efektif, namun dengan tetap adanya partisipasi disektor lain menunjukkan bahwa program yang dijalankan dinilai positif di masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Strategi Pemerintah di Desa Selante untuk mengoptimalkan pembangunan dalam bidang infrastruktur jalan bisa dikatakan cukup baik jika diamati berdasarkan akuntabilitas pemerintah Desa Selante sebab pembangunan infrastruktur jalan di lingkungan bisa menunjukan hasil yang nyata. Selain itu penerapan teori Kaplan dan Norton (2021) tentang *Balanced Scorecard* (BSC) yang memuat empat perspektif utama, (1) Perspektif Keuangan, (2) Perspektif Proses Internal dan Perspektif Pertumbuhan telah menunjukkan angka yang positif yang dibuktikan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan serta dari program pembangunan infrastruktur jalan Desa Selante juga dapat meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian.

Disisi lain, Anggaran Dana Desa (ADD)

Desa Selante belum dapat dikatakan efisien, dikarenakan anggaran yang digunakan tidak hanya berasal dari alokasi dana desa tetapi juga berasal dari ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbawa. Namun hal ini juga memberikan pandangan bahwa pemerintah desa sebagai inisiator pelaksanaan program pembangunan berusaha menyelesaikan permasalahan anggaran Desa Selante, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.

Ditinjau dari faktor pendukung, yang berpengaruh terhadap proses pelaksanaan program pembangunan jalan di Desa Selante dapat berjalan dengan baik karena beberapa faktor yaitu dukungan dari pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat melalui musyawarah mufakat dari tingkat dusun hingga tingkat desa, yang berusaha menentukan tujuan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain faktor pendukung juga terdapat faktor penghambat yaitu mengenai keterbatasan anggaran hal ini dipengaruhi belum terprioritaskan pembangunan jalan desa sebagai program prioritas pemerintah desa dan daerah.

Saran

Dengan berlandaskan hasil penelitian, peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan ataupun memberikan sumbangan masukan terhadap Strategi Pemerintah Desa dalam Mengoptimalkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Selante.

1. Pemerintah Desa Selante khususnya Kepala Desa Selante menyiarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) mengenai dana aspirasi guna meningkatkan transparansi proses pembangunan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan proses partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan melalui kegiatan musyawarah desa secara rutin, guna meningkatkan akuntabilitas dan dukungan publik kepada masyarakat.
3. Pemerintah desa bersama masyarakat membentuk kesepakatan guna menjaga jalan dan lingkungan akibat dampak pelaksanaan program, hal ini dilakukan dengan kegiatan kerja bakti rutin yang dapat memperkuat unsur kesatuan dan keutuhan masyarakat Desa Selante, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.
4. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah, masyarakat serta tokoh masyarakat dengan memberikan aspirasi dan masukan pasca pembangunan jalan Desa Selante, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

- Aizah, L. (2020). Infrastruktur dan pembangunan wilayah. Jakarta: Penerbit Cerdas Bangsa.
- Budi, A. (2020). Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Yogyakarta : Pustaka

- Pelajar.
- Budiman Sudjatmiko (2014). Gerakan Desa Membangun: Dari Desa ke Negara. Jakarta: Gramedia.
- Chandler, A. D. (1962). Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise. MIT Press.
- Daryanto. (2014). Pengantar Ilmu Pemerintahan Desa. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Drucker, Peter F. (1967) The Effective Executive. New York: Harper & Row
- Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman Publishing.
- Hadi, sutrisno. 1986. metodologi research. yogyakarta: andi offset
- Husein Umar. (2001). Strategic Management in Action (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, hlm. 30.
- Lili, M. (2018). Dana Desa: Konsep dan Implementasi. Yogyakarta: Deepublish.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2001). The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment. Harvard Business Press.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Sage Publications
- Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, D. (2014). Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Salim, E. (2005). Pembangunan Berkelanjutan: Mewujudkan Keseimbangan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Siagian, S. P. (2005). Manajemen Strategik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sihaloho, M. (2015). Pemerintahan Desa dalam Perspektif Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Soeharto, D., & Hidayat, T. (2018). Manajemen Pembangunan Infrastruktur: Teori dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta
- Soekanto, Soerjono. (2002). Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press
- Soetomo, S. (2009). Urbanisasi dan Permasalahan Sosial Kota. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sudirman. (2009). Pemerintahan Desa: Perspektif Teori dan Praktik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sugiyono. (2015). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Supangkat, T. (2007). Manajemen Strategik. Gresik: Salemba Empat Suparlan. (2008). Pengantar Ilmu Pemerintahan Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutaryo. (2010). Manajemen Pemerintahan Desa. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Tananah, A. (2016). Manajemen Strategi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Van Horne, J. C. (2002). Financial management and policy (12th ed.). Prentice Hall.
- Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., & Berry, L. L. (1990). Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations. The Free Press
- Sumber Jurnal :**
- Laela, E.S. Sunariyanto, Hirshi A. (2024). Strategi pengembangan kelompok tani dalam mengatasi penurunan hasil pertanian buah apel. Jurnal respon publik, 18(1), 41-48.
- Pratama, A. (2018). Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 22(3), 112-123.
- Ismatullah, Gerry Katon Mahendra. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kaligintung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo 2019. Journal of Social Politics and Governance. 3 (1)
- Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). Accountability in the Public Sector: Lessons from the Challenger Tragedy. Public Administration Review, 47(3), 227-238.
- Undang-undang :**
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Jakarta: Kemendagri.
- Sumber Internet :**
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://sumbawakab.bps.go.id/&ved=2ahUKEwjUILLri bSKAxVCzjgGHex3DAEQFnoECDQQA Q&usg=AOvVaw1x6To52vX-nPzBSYMy>